



**WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALI KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp943.090.236.872,71 |
| b. Belanja | <u>Rp927.786.559.285,76</u> |

Surplus/(Defisit)	Rp15.303.677.586,95
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp14.907.764.409,58
2. Pengeluaran	<u>Rp 2.941.373.130,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp11.966.391.279,58
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp27.270.068.866,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(189.164.754.996,29) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.132.254.991.869,00
 2. Realisasi Rp943.090.236.872,71
 - Selisih (kurang) Rp(189.164.754.996,29)**

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(216.434.821.993,24) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.144.221.381.279,00
 2. Realisasi Rp927.786.559.285,76
 - Selisih (kurang) Rp(216.434.821.993,24)**

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp.27.270.066.996,95 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Defisit Rp(11.966.389.410,00)
 2. Realisasi Rp(15.303.677.586,95)
 - Selisih (kurang) Rp27.270.066.996,95**

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(0,42) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp14.907.764.410,00
 2. Realisasi Rp14.907.764.409,58
 - Selisih (kurang) Rp(0,42)**

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(1.870,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.941.375.000,00
 2. Realisasi Rp2.941.373.130,00
 - Selisih (kurang) Rp(1.870,00)**

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.869,58) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp11.966.389.410,00
 2. Realisasi Rp11.966.391.279,58
 - Selisih (kurang) Rp(1.869,58)**

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terhitung per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp14.907.764.409,58
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp(14.907.764.409,58)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp27.270.068.866,53
d. Lain-Lain	Rp0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp27.270.068.866,53

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terhitung per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp2.620.591.229.700,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp271.790.553.024,94
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.348.800.676.675,75

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terhitung per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp958.550.601.300,53
b. Beban	Rp968.974.982.606,29
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp10.424.381.305,75
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp(4.672.403.151,19)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp15.096.784.456,94
d. Pos Luar Biasa	Rp0,00
Surplus/Defisit – LO	Rp15.096.784.456,94

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas per 1 Januari 2023	Rp14.909.355.865,04
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp196.589.495.528,75
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(181.285.817.941,80)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(2.941.373.130,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp10.701.608,63
f. Saldo awal Kas di BLUD	Rp4.839.065.854,35
g. Saldo awal Kas di FKTP	Rp12.640.114,00
h. Saldo awal Kas di BOS	Rp29.123.860,46
i. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	Rp27.282.361.930,62
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00

1 Saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 Rp27.282.361.930,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.403.620.207.291,59
b. Surplus/Defisit LO	Rp15.096.784.456,94
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp(39.722.746.158,90)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.348.800.676.675,75

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas:
 1. Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 2. Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 3. Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

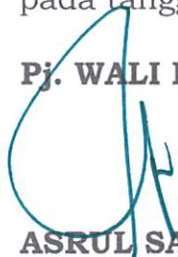
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PALOPO,



ASRUL SANI

Diundangkan di Palopo
pada tanggal, 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI
SELATAN

PEMERINTAH KOTA PALOPO
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI	KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		SALDO AKHIR
						PEMBAYARAN	LEBIH BAYAR	
1	Piutang Pajak	8.434.685.161,00	0,00	84.254.561,00	3.845.443.739,00	2.703.107.150,00	4.111.016,00	9.665.387.327,00
	Piutang Pajak Air Tanah	852.736,00	0,00	0,00	1.144.925,00	484.942,00	0,00	1.512.719,00
	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	228.535.118,00	0,00	0,00	278.291.740,00	230.782.384,00	2.407.266,00	278.451.740,00
	Piutang Pajak Hotel	60.075.219,00	0,00	0,00	130.853.068,00	48.605.219,00	300.000,00	142.623.068,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.335.059.121,00	0,00	0,00	1.516.553.092,00	1.334.120.486,00	0,00	1.517.491.727,00
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	67.236.384,00	0,00	0,00	187.176.730,00	56.879.700,00	0,00	197.533.414,00
	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	605.908.843,00	0,00	0,00	701.757.290,00	579.772.912,00	1.403.750,00	729.296.971,00
	Piutang PBBP2	6.137.017.740,00	0,00	84.254.561,00	974.090.694,00	452.461.507,00	0,00	6.742.901.488,00
	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	55.576.200,00	0,00	0,00	55.576.200,00
2	Piutang Retribusi	2.650.101.107,00	0,00	1.090.834.052,00	188.935.620,00	3.188.671.209,00	0,00	741.199.570,00
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	489.144.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.144.720,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.024.646.448,00	0,00	1.091.194.052,00	90.735.000,00	3.115.840.500,00	0,00	90.735.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	780.000,00	0,00	0,00	3.007.500,00	0,00	0,00	3.787.500,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.697.000,00	0,00	(360.000,00)	5.080.000,00	2.270.000,00	0,00	42.147.000,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	23.765.500,00	0,00	0,00	22.011.000,00	23.765.500,00	0,00	22.011.000,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	24.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456.000,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	47.611.439,00	0,00	0,00	68.102.120,00	46.795.209,00	0,00	68.918.350,00
3	Piutang Lain-lain PAD yg Sah	0,00	31.380.292.154,75	(16.692.891.426,38)	12.692.175.903,33	12.792.750.046,00	0,00	14.586.826.585,71
	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	81.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.746.500,00
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	97.558.364,74	49.530.573,62	0,00	0,00	0,00	147.088.938,36
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	16.988.295.333,33	(16.742.422.000,00)	5.615.750.333,33	2.926.500.000,00	0,00	2.935.123.666,67
	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	14.212.108.065,00	0,00	7.023.125.470,00	9.866.250.046,00	0,00	11.368.983.489,00
	Piutang Remunerasi TDF	0,00	583.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	583.891,68
	Piutang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	53.300.100,00	0,00	0,00	53.300.100,00
4	Piutang Dana Transfer	0,00	22.127.197.092,00	0,00	24.280.328.641,00	22.127.197.092,00	0,00	24.280.328.641,00

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI	KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		SALDO AKHIR
						PEMBAYARAN	LEBIH BAYAR	
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	6.297.511.742,00	0,00	4.839.967.467,00	6.297.511.742,00	0,00	4.839.967.467,00
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.339.372.818,00	0,00	5.986.203.475,00	4.339.372.818,00	0,00	5.986.203.475,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.760.319.885,00	0,00	2.792.408.522,00	8.760.319.885,00	0,00	2.792.408.522,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	90.203.377,00	0,00	62.560.971,00	90.203.377,00	0,00	62.560.971,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	2.639.789.270,00	0,00	2.377.105.206,00	2.639.789.270,00	0,00	2.377.105.206,00
	Piutang Pelayanan kesehatan Gratis (BPJS Provinsi)	0,00	0,00	0,00	8.202.306.000,00	0,00	0,00	8.202.306.000,00
	Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	19.777.000,00	0,00	0,00	19.777.000,00
5	Piutang Lainnya	53.507.489.246,75	(53.507.489.246,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang TGR Lancar	316.169.433,50	(316.169.433,50)	0,00	285.772.302,10	110.389.805,00	17,00	175.382.514,10
7	Piutang TGR Non Lancar	11.149.603.141,34	316.169.433,50	(3.588.100,63)	507.970.533,15	84.787.236,00	41.398.901,84	11.926.766.673,20
8	Dana Bergulir	401.144.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.144.409,00
	TOTAL	76.459.192.498,59	0,00	(15.521.390.914,01)	41.800.626.738,58	41.006.902.538,00	45.509.934,84	61.777.035.720,01

Pj. WALI KOTA PALOPO


ASRUL SANI

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN PIUTANG	PENYISIHAN				
		SALDO AWAL	BEBAN PENYISIHAN	KOREKSI	PENYISIHAN TERHAPUS AKIBAT PELUNASAN	AKUMULASI PENYISIHAN
1	Piutang Pajak	4.179.925.953,76	1.177.953.604,07	532.388.775,49	(533.586.091,80)	5.356.682.241,51
	Piutang Pajak Air Tanah	15.910,49	232.894,81	0,00	(48.494,20)	200.311,10
	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	1.551.741,41	50.853.326,79	0,00	(24.559.894,20)	27.845.174,00
	Piutang Pajak Hotel	2.165.520,60	23.655.548,11	0,00	(6.923.761,90)	18.897.306,80
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.609.237,43	134.324.211,63	0,00	(133.412.048,60)	8.521.400,46
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.100.283,78	31.560.266,48	0,00	(13.360.420,00)	21.300.130,25
	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.894.194,75	150.229.795,66	0,00	(75.235.161,40)	90.888.829,00
	Piutang PBBP2	4.149.589.065,32	781.539.940,60	532.388.775,49	(280.046.311,50)	5.183.471.469,90
	Piutang Pajak Parkir	0,00	5.557.620,00	0,00	0,00	5.557.620,00
2	Piutang Retribusi	687.452.936,94	458.648.169,51	(191.038.310,94)	(468.267.800,90)	486.794.994,60
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	460.840.168,50	22.643.641,20	(22.643.641,20)	0,00	460.840.168,50
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	203.638.383,74	410.129.491,00	(152.653.469,74)	(460.660.730,00)	453.675,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	26.700,00	173.737,50	0,00	0,00	200.437,50
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.362.800,00	8.687.525,00	(5.958.800,00)	(551.000,00)	12.540.525,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	118.827,50	2.367.777,50	0,00	(2.376.550,00)	110.055,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	12.228.000,00	9.782.400,00	(9.782.400,00)	0,00	12.228.000,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	238.057,20	4.863.597,30	0,00	(4.679.520,90)	422.133,60
3	Piutang Lain-lain PAD yg Sah	17.570.029.149,46	2.849.181.759,23	(16.684.635.289,55)	(1.001.970.004,60)	2.732.605.614,54
	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	81.746.500,00	0,00	0,00	0,00	81.746.500,00
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	58.961.792,40	30.340.435,50	57.786.710,46	0,00	147.088.938,36
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	16.857.520.166,67	92.625.585,00	(16.742.422.000,00)	(15.345.000,00)	192.378.751,67
	Piutang Pendapatan BLUD	571.797.770,93	2.726.160.269,02	0,00	(986.625.004,60)	2.311.333.035,35
	Piutang Remunerasi TDF	2.919,46	55.469,71	0,00	0,00	58.389,17
	Piutang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Dana Transfer	110.635.985,49	2.223.485.366,95	(0,03)	(2.212.719.709,20)	121.401.643,21
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.487.558,71	622.463.452,83	0,00	(629.751.174,20)	24.199.837,34

NO	URAIAN PIUTANG	PENYISIHAN				
		SALDO AWAL	BEBAN PENYISIHAN	KOREKSI	PENYISIHAN TERHAPUS AKIBAT PELUNASAN	AKUMULASI PENYISIHAN
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.696.864,09	442.171.435,09	0,00	(433.937.281,80)	29.931.017,38
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.801.599,43	846.192.431,69	0,00	(876.031.988,50)	13.962.042,61
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	451.016,89	8.882.125,67	0,00	(9.020.337,70)	312.804,86
	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	13.198.946,38	262.665.506,68	(0,03)	(263.978.927,00)	11.885.526,03
	Piutang Pelayanan kesehatan Gratis (BPJS Provinsi)	0,00	41.011.530,00	0,00	0,00	41.011.530,00
	Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	98.885,00	0,00	0,00	98.885,00
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang TGR Lancar	1.580.847,00	17.441.742,41	(1.580.847,17)	0,00	17.441.742,25
7	Piutang TGR Non Lancar	10.888.115.803,24	201.439.884,75	(2.361.409,84)	17.921.739,72	11.069.272.538,43
8	Dana Bergulir	401.144.409,00	0,00	0,00	0,00	401.144.409,00
	TOTAL	33.838.885.084,88	6.928.150.526,90	(16.347.227.082,03)	(4.198.621.866,79)	20.185.343.183,54

Pj. WALI KOTA PALOPO


ASRUL SANI

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	4	5	6	7
1	Dana Bergulir	401.144.409,00	0,00	0,00	401.144.409,00
2	Penyisihan Dan bergulir	401.144.409,00	0,00	0,00	401.144.409,00
			-		

Pj. WALI KOTA PALOPO

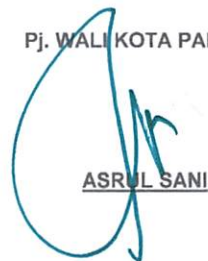

ASRUL SANI

Kota Palopo
 Daftar Penyerahan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
 Tahun Anggaran 2023

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyerahan Modal (Investasi daerah)	Nilai Penyerahan Modal			Jumlah modal yang telah diserahkan Tahun ini (Rp)
				AsetBarang	Lang (Rp)	Surplus Investasi	
1.	BANK SUL SEL CAB. PALOPO						
1	Tahun 2003	BPD SS Cab. Palopo	Inasruki Gub. Sul-Sel No. INS. 841/III/1991 qtl. 2 Juli 1991		21.524.542,00		21.524.542,00
2	Tahun 2004	Bank Sul-Sel Cabang Palopo	- sda -		258.475.458,00		280.000.000,00
3	Tahun 2005	Bank Sul-Sel Cabang Palopo	- sda -		720.000.000,00		1.000.000.000,00
4	Tahun 2006	Bank Sul-Sel Cabang Palopo	- sda -		1.177.098.600,00		2.177.098.600,00
5	Tahun 2007	Bank Sul-Sel Cabang Palopo	- sda -		500.000.000,00		2.677.098.600,00
6	Tahun 2008	Bank Sul-Sel Cabang Palopo	- sda -		500.000.000,00		3.177.098.600,00
7	Tahun 2009	Bank Sul-Sel	- sda -		622.901.400,00		4.000.000.000,00
8	Tahun 2010	Bank Sul-Sel	- sda -		1.000.000.000,00		5.000.000.000,00
9	Tahun 2011	Bank Sul-Sel	- sda -		1.500.000.000,00		6.500.000.000,00
10	Tahun 2012	Bank Sul-Sel	- sda -		1.500.000.000,00		8.000.000.000,00
11	Tahun 2013	Bank Sul-Sel	Perda No. 7 Tahun 2013		2.000.000.000,00		10.000.000.000,00
12	Tahun 2014	Bank Sul-Sel	- sda -		2.500.000.000,00		12.500.000.000,00
13	Tahun 2015	Bank Sul-Sel	- sda -		2.500.000.000,00		15.000.000.000,00
14	Tahun 2016	Bank Sul-Sel	- sda -		2.500.000.000,00		17.500.000.000,00
15	Tahun 2017	Bank Sul-Sel	- sda -		2.500.000.000,00		20.000.000.000,00
16	Tahun 2020	Bank Sul-Sel	SF/09/R/GP/K/2021				20.000.000.000,00
17	Tahun 2023	Bank Sul-Sel	Akta Notaris Mussthar, SH, M.Kn No. 02 Tanggal 02 Desember 2020		14.626.000.000,00		34.626.000.000,00
II.	KPN KARYA IDAMAN						
1	Tahun 2005	KPN Karya Idaman	Nota Kasepakatan No. 900/562/JM/X/2005 No. 19/KPN-KM/X/2005		200.000.000,00		200.000.000,00
2	Tahun 2014	KPN Karya Idaman	Divestasi		(196.272.228,81)		3.727.771,19
III.	PDAM KOTA PALOPO						
1	Tahun 2011	PDAM Kota Palopo	Perda No. 6 Tahun 2011		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00
2	Tahun 2012	PDAM Kota Palopo	- sda -		8.000.000.000,00		12.000.000.000,00
3	Tahun 2013	PDAM Kota Palopo	- sda -		12.000.000.000,00		24.000.000.000,00
4	Tahun 2013	PDAM Kota Palopo	Perda No. 6 Tahun 2013		6.962.640.220,00		30.962.640.220,00
5	Tahun 2014	PDAM Kota Palopo	Perda No. 4 Tahun 2014		5.000.000.000,00		35.962.640.220,00
6	Tahun 2015	PDAM Kota Palopo	- sda -		27.556.000.000,00		63.518.640.220,00

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi daerah)	Nilai Penyertaan Modal			Jumlah modal yang telah disertakan Tahun Ini (Rp)
				Aset/Barang	Uang (Rp)	Surplus Investasi	
7	Tahun 2016	PDAM Kota Palopo	- sda -		6.000.000.000,00		69.518.640.220,00
8	Tahun 2017	PDAM Kota Palopo	- sda -		3.130.951.000,00		72.649.591.220,00
9	Tahun 2018	PDAM Kota Palopo	- sda -		621.647.000,00		73.271.238.220,00
10	Tahun 2023	PDAM Kota Palopo	Koreksi Ekuitas Tahun 2023		9.503.368.646,52		82.774.606.866,52
IV	PERUSDA KOTA PALOPO						
1	Tahun 2015	Perusda Kota Palopo	Perda No. 2 Tahun 2015	8.412.141.000,00	3.000.000.000,00		11.412.141.000,00
TOTAL							128.816.475.637,71

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Dinas Pendidikan	306.302.227.493,99	9.401.352.832,00	51.075.953.823,84	264.627.626.502,15
2	Dinas Kesehatan	259.591.702.299,59	32.816.082.062,73	4.105.897.453,73	288.301.886.908,59
3	RSUD Sawerigading	332.689.821.500,51	6.443.269.085,00	3.049.114.360,06	336.083.976.225,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.458.504.325.155,29	365.364.487.146,79	351.567.976.171,00	1.472.300.836.131,08
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.171.296.860,65	512.492.650,00	220.724.750,00	41.463.064.760,65
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.815.481.500,00	448.681.000,00	300.000.000,00	2.964.162.500,00
7	Dinas Perhubungan	15.382.200.596,00	41.905.000,00	6.691.040.600,00	8.733.064.996,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	130.702.577.434,31	12.586.695.143,80	843.914.320,00	142.445.358.258,11
9	Dinas Pertanahan	6.932.103.090,00	3.563.439.020,00	5.957.161.260,00	4.538.380.850,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.567.154.360,00	-	5.000.000,00	1.562.154.360,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	535.170.400,00	15.021.500,00	-	550.191.900,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.359.639.837,89	1.684.501.750,00	2.794.330.828,28	14.249.810.759,61
13	Dinas Sosial	5.624.673.788,00	564.965.000,00	273.863.300,00	5.915.775.488,00
14	Dinas Tenaga Kerja	8.939.627.512,60	169.081.000,00	241.714.349,00	8.866.994.163,60
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.040.156.558,00	259.385.000,00	601.355.075,00	3.698.186.483,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.860.211.760,00	667.831.575,00	1.003.237.000,00	8.524.806.335,00
17	Dinas Kebudayaan	1.302.770.577,00	467.550.000,00	631.200.000,00	1.139.120.577,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	46.358.041.209,00	55.776.711.890,00	1.239.436.000,00	100.895.317.099,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	5.044.563.100,00	16.300.000,00	-	5.060.863.100,00
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.139.436.685,00	1.158.580.075,00	635.305.000,00	10.662.711.760,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	2.554.203.900,00	5.888.000,00	-	2.560.091.900,00

No.	SKPD	2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.354.033.965,00	42.251.040,00	2.090.652.300,00	21.305.632.705,00
23	Sekretariat Daerah	200.798.753.061,01	66.037.017.900,00	64.317.439.125,44	202.518.331.835,57
24	Sekretariat DPRD	46.275.125.264,00	11.560.890.369,00	2.893.512.593,00	54.942.503.040,00
25	Inspektorat Daerah	3.656.793.762,00	29.748.000,00	-	3.686.541.762,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.647.150.789,00	507.619.000,00	404.400.000,00	1.750.369.789,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.523.095.310,00	7.005.147.656,00	5.675.860.875,00	16.852.382.091,00
28	Badan Pendapatan Daerah	8.527.062.589,00	447.295.000,00	16.000.000,00	8.958.357.589,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.316.212.920,00	18.188.000,00	-	1.334.400.920,00
30	Kecamatan Wara	9.235.688.205,00	-	5.000.000,00	9.230.688.205,00
31	Kecamatan Wara Utara	7.301.629.338,00	13.445.000,00	-	7.315.074.338,00
32	Kecamatan Wara Selatan	4.932.825.233,00	2.142.268.866,00	463.780.770,00	6.611.313.329,00
33	Kecamatan Telluwanua	6.703.653.476,00	227.468.000,00	-	6.931.121.476,00
34	Kecamatan Wara Barat	3.931.976.876,00	2.990.250,00	20.522.700,00	3.914.444.426,00
35	Kecamatan Wara Timur	9.574.101.561,92	426.532.000,00	-	10.000.633.561,92
36	Kecamatan Mungkajang	3.770.994.527,34	29.810.160,00	15.962.845,00	3.784.841.842,34
37	Kecamatan Bara	6.364.266.505,00	1.977.452.500,00	555.463.500,00	7.786.255.505,00
38	Kecamatan Sendana	4.110.704.735,00	17.810.500,00	9.985.000,00	4.118.530.235,00
39	Dinas Ketahanan Pangan	1.059.641.700,00	-	15.895.800,00	1.043.745.900,00
40	Dinas Persandian dan Statistik	749.543.300,00	264.299.000,00	253.675.000,00	760.167.300,00
41	Dinas Kearsipan	593.400.900,00	310.307.300,00	375.616.500,00	528.091.700,00
42	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.129.444.200,00	264.599.000,00	24.266.500,00	2.369.776.700,00
43	Dinas Perpustakaan	5.562.036.184,87	80.630.150,00	118.357.450,00	5.524.308.884,87
44	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	64.952.556.298,95	1.443.830.480,00	373.368.523,00	66.023.018.255,95
45	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.524.018.674,00	464.703.453,00	1.644.324.703,00	13.344.397.424,00

No.	SKPD	2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
46	Dinas Perikanan	45.336.809.770,38	329.185.270,00	619.577.151,00	45.046.417.889,38
47	Dinas Perdagangan	81.634.978.744,50	94.510.409.524,00	117.196.053.124,00	58.949.335.144,50
48	Dinas Perindustrian	9.205.812.657,50	148.500.000,00	3.017.595,00	9.351.295.062,50
49	Dinas Transmigrasi	580.823.000,00	-	-	580.823.000,00
Jumlah		3.247.770.519.165,30	680.266.618.148,32	628.329.956.345,35	3.299.707.180.968,27

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uralan	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	3
1	Tanah	485.971.657.764,79	3.441.627.160,00	19.712.798.760,00	469.700.486.164,79
2	Peralatan dan Mesin	529.180.044.497,95	51.702.675.225,73	48.355.498.820,58	532.527.220.903,10
3	Gedung Dan Bangunan	866.876.803.104,84	475.689.617.374,00	406.115.732.431,17	936.450.688.047,67
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.200.793.825.643,12	88.387.727.516,80	102.488.150,00	1.289.079.065.009,92
5	Aset Tetap lainnya	38.089.710.371,60	2.969.245.384,00	28.352.517.150,60	12.706.438.605,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	126.858.477.783,00	58.075.725.487,79	125.690.921.033,00	59.243.282.237,79
	Jumlah	3.247.770.519.165,30	680.266.618.148,32	628.329.956.345,35	3.299.707.180.968,27

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI

PEMERINTAH KOTA PALOPO
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Reklasifikasi										Penghapusan	Saldo Per 31 Desember 2023	
			Bertambah					Berkurang							
			Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan,Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap lainnya	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan,Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap lainnya			
1	Pertanahan	197.842.000,00	113.263.620,00	-	-	-	-	-	202.947.000,00	-	-	-	-	-	108.158.620,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Penataan Ruang	123.337.796.575,00	-	-	44.424.402.526,84	11.396.124.930,95	-	-	-	-	118.913.155.154,00	4.006.934.421,00	-	-	56.238.234.457,79
3	Dinas Kesehatan	66.272.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.272.635,00	-	-	-	-
4	Dinas Pendidikan	2.807.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.807.500,00	-	-	-	-
5	DPRD	2.196.550.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.196.550.800,00	-	-	-	-
6	Dinas Pertanian	292.268.523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.268.523,00	-	-	-
7	Dinas Perdagangan	754.954.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.954.750,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	2.141.934.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.141.934.410,00
9	Kecamatan Sendana	9.985.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.985.000,00	-	-	-	-	-
		126.858.477.783,00	113.263.620,00	-	44.424.402.526,84	13.538.059.340,95	-	202.947.000,00	9.985.000,00	121.178.786.089,00	4.299.202.944,00	-	-	-	59.243.282.237,79

Pj. WALI KOTA PALOPO

ASRUL SANI

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2022	Mutasi 2023		Saldo Akhir 2023
			Bertambah	Berkurang	
1	Tuntutan Ganti Rugi	11.149.603.141,34	777.163.531,86	0,00	11.926.766.673,20
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	67.310.858.629,00	0,00	0,00	67.310.858.629,00
3	Aset Tak Berwujud	2.522.850.171,00	164.668.500,00	0,00	2.687.518.671,00
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.995.275.228,50)	(254.249.817,50)	0,00	(2.249.525.046,00)
5	Aset Lain-lain	75.451.277.216,26	62.232.485.907,18	14.568.720.180,84	123.115.042.942,60
6	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	(72.236.293.452,58)	0,00	(72.236.293.452,58)
6	Penyisihan TGR	(10.888.115.803,24)	(217.852.597,20)	(36.695.862,00)	(11.069.272.538,44)
7	Dana Transfer TDF	2.407.498.841,00	3.003.119.575,00	2.407.498.841,00	3.003.119.575,00
	JUMLAH	145.958.696.966,86	(6.530.958.353,24)	16.939.523.159,84	122.488.215.453,78

Pj. WALI KOTA PALOPO


ASRUL SANI

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2								
3								
dst								
Jumlah								

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	2023
1	Utang Bunga	567.403.145,99	471.522.735,27	567.403.145,99	471.522.735,27
2	Utang PFK	1.591.455,46	12.293.064,09	1.591.455,46	12.293.064,09
3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24
4	Pendapatan Diterima Dimuka	625.745.136,11	685.421.039,16	628.661.802,78	682.504.372,49
5	Utang Belanja	51.228.839.654,83	83.126.844.489,56	40.436.102.770,06	93.919.581.374,33
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	41.897.006.753,00	122.944.738.768,79	1.227.372.408,00	163.614.373.113,79
	JUMLAH	97.261.959.274,63	210.182.193.226,11	45.802.504.711,53	261.641.647.789,21

Pj. WALI KOTA PALOPO



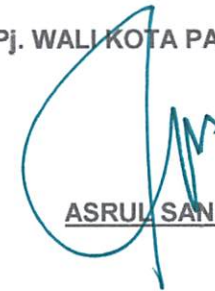
ASRUL SANI

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam negeri - Jangka Panjang	13.090.278.364,97	-	2.941.373.129,24	10.148.905.235,73
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
	Jumlah	13.090.278.364,97	-	2.941.373.129,24	10.148.905.235,73

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kota Palopo 2024

Nomor : 2 TAHUN 2024

Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA 7=4+5+6	DASAR HUKUM 8
			ANGGARAN 4	REALISASI 5	TAMBAH/ KURANG 6		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
	Nihil	Nihil	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH						0,00	

Pj. WALI KOTA PALOPO



ASRUL SANI

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No.	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	%saham daerah	Kepemilikan Daerah
2.	Bidang Aneka Industri																	
	I. PDAM Kota Palopo	I		29.720.498.080,00	56.994.637.442,37		86.715.135.522,37	3.940.528.655,85	-	3.940.528.655,85		-	73.271.238.220,00	9.503.368.646,52		82.774.606.866,52		100,00
3.	Bidang Perdagangan																	
	I. Perusda Kota Palopo	I		-	-		-	-		-			-		-	-		-

Pj. WALI KOTA PALOPO



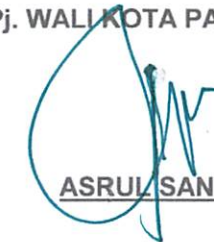
ASRUL SANI

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024
Nomor : 2 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No.	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotot	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
2.	Bidang Aneka Industri I. PDAM Kota Palopo	I		67.577.436.159,00	63.487.431.007,21	4.090.005.151,79	453.855.165,17	-	4.543.860.316,96
3.	Bidang Perdagangan I. Perusda Kota Palopo	I		-	-	-	-	-	-

Pj. WALL KOTA PALOPO



ASRUL SANI